



Demokrasi Membangun Sistem Pendidikan Pada Pemerintahan di Indonesia

Wan Intan Syahfira¹, Indri Triani Sitanggang², Fatimah Asy Syifa³, Archangela⁴, Anjar Nayla⁵, Gloria Angelina Sipankar⁶, Aulia Ananda Putri⁷, Sri Yunita⁸

¹²³⁴⁵⁶⁷⁸Universitas Negeri Medan

Received: 2024-09-09; Accepted: 2024-09-26; Published: 2024-10-06

Abstrak

Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan rakyat, yang berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik melalui pemilihan umum, perwakilan, dan kebebasan berekspresi. Dalam konteks global, demokrasi telah menjadi tolok ukur kemajuan politik dan sosial, dengan banyak negara yang berupaya menerapkan prinsip-prinsip demokratis untuk menciptakan stabilitas, keadilan, dan kesejahteraan. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan yang mengandalkan sumber bibliografi dari buku dan artikel di jurnal ilmiah yang berkaitan dengan pokok permasalahan, pembacaan data dengan pemikiran para ahli dengan pendekatan konstruktif dan interpretasi pada isi pokok yang diteliti. Adapun hasil dari penelitian yang dilakukan antara lain: a) Demokrasi adalah penghormatan terhadap hak asasi manusia, kesetaraan, partisipasi warga, dan akuntabilitas pemerintah. b) Demokrasi diharapkan mampu tercipta pemerintahan yang transparan, bertanggung jawab, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. c) Keberhasilan demokrasi bergantung pada pendidikan, keterlibatan aktif warga, serta pemeliharaan institusi dan proses yang mendukung prinsip-prinsip demokratis.

Kata Kunci: Demokrasi, Sistem Pendidikan, Pemerintahan, Indonesia

Abstract

Democracy is a system of government in which power is in the hands of the people, who participate in political decision making through elections, representation, and freedom of expression. In a global context, democracy has become a benchmark for political and social progress, with many countries seeking to apply democratic principles to create stability, justice and prosperity. This research uses a library study method that relies on bibliographic sources from books and articles in scientific journals related to the subject matter, reading data with the thoughts of experts with a constructive approach and interpretation of the main content being researched. The results of the research carried out include: a) Democracy is respect for human rights, equality, citizen participation and government accountability. b) Democracy is expected to be able to create a government that is transparent, responsible and responsive to the needs of the community. c) The success of democracy depends on education, the active involvement of citizens, and the maintenance of institutions and processes that support democratic principles.

Keyword: *Democracy, Education System, Government, Indonesia*

Copyright © 2022 Ar-Raudah : Jurnal Pendidikan Dan Keagamaan

A. LATAR BELAKANG

Demokrasi, yang berasal dari kata Yunani "demos" (rakyat) dan "kratos" (kekuasaan), adalah sistem pemerintahan di mana rakyat memiliki kekuasaan tertinggi. Sistem ini dianggap sebagai salah satu bentuk pemerintahan yang paling adil karena menjunjung tinggi partisipasi, kebebasan berpendapat, dan hak asasi manusia.

Dalam konteks global, demokrasi telah menjadi tolok ukur kemajuan politik dan sosial, dengan banyak negara yang berupaya menerapkan prinsip-prinsip demokratis untuk menciptakan stabilitas, keadilan, dan kesejahteraan. Meskipun demikian, demokrasi juga menghadapi berbagai tantangan, termasuk korupsi, kesenjangan ekonomi, dan polarisasi politik, yang dapat mengancam fungsinya. Oleh karena itu, memahami dinamika demokrasi menjadi sangat penting untuk menganalisis bagaimana sistem ini dapat dipertahankan dan diperkuat di masa depan.

Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang mereka pilih. Istilah "demokrasi" berasal dari bahasa Yunani kuno, "demos" yang berarti rakyat, dan "kratos" yang berarti kekuasaan atau pemerintahan. Seiring berjalannya waktu, demokrasi telah berkembang menjadi salah satu sistem politik yang paling populer dan diterima di banyak negara di seluruh dunia.

Dalam sebuah demokrasi, prinsip-prinsip dasar seperti kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, hak untuk memilih dan dipilih, serta perlindungan hak asasi manusia merupakan pilar-pilar utama yang mendasari berjalannya sistem ini. Demokrasi juga mendorong partisipasi aktif warga negara dalam pengambilan keputusan politik, yang bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.

Namun, penerapan demokrasi tidak selalu berjalan mulus. Berbagai tantangan seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, polarisasi politik, dan ketidaksetaraan ekonomi sering kali menjadi hambatan bagi demokrasi untuk berfungsi secara optimal. Oleh karena itu, memahami konsep dan implementasi demokrasi, termasuk kelebihan dan kekurangannya, menjadi penting dalam upaya memperkuat sistem ini dan memastikan bahwa demokrasi benar-benar membawa manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan yang mengandalkan sumber bibliografi dari buku dan artikel di jurnal ilmiah yang berkaitan dengan pokok permasalahan, pembacaan data dengan pemikiran para ahli dengan pendekatan konstruktif dan interpretasi pada isi pokok yang diteliti. (Budi Purwoko, 2018)

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Ruang Lingkup Demokrasi

Demokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik dipegang oleh rakyat. Istilah "demokrasi" berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu "demos" yang berarti rakyat, dan "kratos" yang berarti kekuasaan atau pemerintahan. Oleh karena itu, demokrasi secara harfiah berarti "pemerintahan oleh rakyat."

Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang mereka pilih. Istilah "demokrasi" berasal dari bahasa Yunani kuno, "demos" yang berarti rakyat, dan "kratos" yang berarti kekuasaan atau pemerintahan. Seiring berjalannya waktu, demokrasi telah berkembang menjadi salah satu sistem politik yang paling populer dan diterima di banyak negara di seluruh dunia.

Dalam sebuah demokrasi, prinsip-prinsip dasar seperti kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, hak untuk memilih dan dipilih, serta perlindungan hak asasi manusia merupakan pilar-pilar utama yang mendasari berjalannya sistem ini. Demokrasi juga mendorong partisipasi aktif warga negara dalam pengambilan keputusan politik, yang bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.

Namun, penerapan demokrasi tidak selalu berjalan mulus. Berbagai tantangan seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, polarisasi politik, dan ketidaksetaraan ekonomi sering kali menjadi hambatan bagi demokrasi untuk berfungsi secara optimal. Oleh karena itu, memahami konsep dan implementasi demokrasi, termasuk kelebihan dan kekurangannya, menjadi penting dalam upaya memperkuat sistem ini dan memastikan bahwa demokrasi benar-benar membawa manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dalam praktiknya, demokrasi memungkinkan rakyat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik melalui mekanisme seperti pemilihan umum. Pemimpin dan wakil rakyat dipilih oleh masyarakat untuk mewakili kepentingan mereka dalam lembaga pemerintahan. Prinsip dasar dari demokrasi meliputi kebebasan berbicara, kebebasan pers, hak untuk memilih dan dipilih, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Demokrasi sering dipandang sebagai sistem yang paling adil dan transparan karena memberikan suara kepada setiap individu dalam masyarakat, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau latar belakang lainnya. Tujuannya adalah untuk menciptakan pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan keinginan rakyat, serta untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh segelintir elit atau penguasa otoriter.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana seluruh rakyat terlibat dalam pengambilan keputusan melalui perwakilan mereka, yang dikenal sebagai pemerintahan rakyat. Sedangkan secara etimologis, kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu *demos* dan *kratos*.

Dilansir dari laman Dirjen Kemendagri, kata *demos* memiliki arti sebagai rakyat dan *kratos* berarti pemerintahan atau kekuasaan yang mutlak. Sehingga secara harfiah demokrasi dapat dimengerti sebagai kekuasaan yang mutlak oleh rakyat. Tak hanya itu,

terdapat beberapa pengertian dari para ahli pula yang meskipun berbeda-beda tetapi memiliki konsep sama dalam melibatkan rakyat.

Berikut beberapa pengertian demokrasi menurut para ahli, dilansir dari laman Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara:

1. Abraham Lincoln
Abraham mendefinisikan demokrasi sebagai pemerintahan rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi melibatkan partisipasi aktif dari rakyat dalam pemerintahan negara.
2. Winston Churchill
Demokrasi diartikan sebagai sistem terburuk kecuali semua yang pernah dicoba. Hal ini berarti meski demokrasi mungkin memiliki kelemahan, tetapi tidak ada sistem lainnya yang lebih baik daripada demokrasi.
3. Robert Dahl
Demokrasi merupakan pengambilan keputusan kolektif oleh warga negara yang memiliki hak suara yang sama, yang melibatkan sejumlah besar masalah publik, dan dilakukan dengan cara yang mengizinkan warga negara untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu.
4. Joseph Schumpeter
Menurut Joseph, demokrasi merupakan sistem yang memilih pemimpin politik melalui pemilihan umum. Sehingga dalam hal ini demokrasi menekan peran pemilihan dalam menentukan pemimpin.

Demokrasi Berdasarkan Prinsip Ideologi antara lain:

- a. Demokrasi liberal, merupakan demokrasi yang menekankan pada prinsip kebebasan individu dan mengabaikan kepentingan umum. Contohnya adanya sistem multi partai yang mendorong lahirnya partai-partai baru di negara.
- b. Demokrasi rakyat, merupakan demokrasi yang didasarkan pada paham sosialisme dan komunisme dan lebih mengutamakan kepentingan umum atau negara. Contohnya seluruh masyarakat bersama-sama ikut aktif dalam kegiatan negara, seperti pemilu.
- c. Demokrasi Pancasila, merupakan jenis demokrasi yang ada di Indonesia dengan bersumber dari nilai Pancasila yang berasaskan musyawarah mufakat dengan memprioritaskan kepentingan seluruh masyarakat. Contohnya masyarakat Indonesia menerapkan prinsip musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan, aktif dalam pemilu dan pilkada, ikut pemilihan ketua kelas, dan lainnya.

Untuk mewujudkan pemerintahan yang demokrasi maka perlu adanya unsur-unsur pendukungnya, Berikut unsur pendukung demokrasi yang bersumber dari buku Pendidikan Kewarganegaraan Pancasila, Demokrasi, dan Pencegahan Korupsi oleh A Ubaedillah sebagai berikut:

- 1) Negara Hukum
Negara hukum ini merupakan negara yang memberikan perlindungan hukum bagi warga negara melalui pelembagaan peradilan yang bebas dan ada jaminan hak asasi manusia. Ciri-ciri negara hukum tersebut antara lain:
- 2) Ada perlindungan HAM

Ada pemisahan kekuasaan pada lembaga negara Pemerintahan berdasarkan peraturan

3) Ada peradilan administrasi.

Istilah negara hukum di Indonesia tertuang dalam UUD 1945 berbunyi "Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka".

4) Masyarakat Sipil

Masyarakat sipil memiliki ciri yang terbuka, egaliter, bebas dari dominasi negara. Masyarakat ini adalah elemen penting untuk membangun demokrasi dengan adanya partisipasi dalam proses pengambilan keputusan oleh negara. Masyarakat sipil dapat menjadi tumpuan penyeimbang kekuatan negara yang cenderung koruptif.

5) Aliansi Kelompok Strategi

Aliansi kelompok ini terdiri dari partai politik, kelompok gerakan, dan kelompok penekan atau kelompok yang di dalamnya pers bebas. Kelompok ini berperan besar dalam demokratisasi dengan sikap kritis, independen, dan konstitusional dalam menyuarakan misi organisasi. Tak hanya itu kalangan cendekiawan dan pers bebas juga berperan penting dalam mewujudkan demokrasi.

Sistem Demokrasi di Indonesia

Dari sudut pandang titik tekan yang menjadi perhatiannya, demokrasi dibedakan menjadi:

1. Demokrasi formal: demokrasi yang menjunjung persamaan dalam bidang politik, tanpa disertai upaya untuk mengurangi kesenjangan dalam bidang ekonomi.
2. Demokrasi material: demokrasi yang menekankan pada upaya menghilangkan kesenjangan ekonomi, sementara persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan atau bahkan dihilangkan.
3. Demokrasi gabungan: demokrasi paduan dari demokrasi formal dan material. Demokrasi ini berupaya mengambil hal-hal baik dan membuang hal buruk dari kedua demokrasi tersebut.

Dari cara penyaluran kehendak rakyat, bentuk demokrasi dibedakan menjadi:

- a. Demokrasi langsung: demokrasi yang melibatkan rakyat untuk mengemukakan kehendak dan pendapatnya dalam pemusyawaratan untuk menentukan kebijakan umum negara.
- b. Demokrasi tidak langsung: demokrasi yang dilaksanakan dengan sistem perwakilan. Dalam demokrasi ini, rakyat menyalurkan kehendaknya dengan memilih wakil-wakilnya untuk duduk dalam dewan perwakilan rakyat. Termasuk juga dalam demokrasi ini, demokrasi perwakilan dengan sistem referendum, yaitu gabungan antara demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Rakyat memilih wakil-wakilnya untuk duduk dalam dewan perwakilan rakyat, tapi dewan itu dikontrol oleh pengaruh rakyat dengan sistem referendum dan inisiatif rakyat.

Dari tugas-tugas dan hubungan antara alat-alat kelengkapan negara, demokrasi dibedakan menjadi beberapa bentuk, yakni:

- 1) Demokrasi dengan sistem parlementer: dalam demokrasi ini terdapat hubungan yang kuat antara badan legislatif dan badan eksekutif.
- 2) Demokrasi dengan sistem pemisahan kekuasaan: dalam demokrasi ini, kekuasaan dipisahkan menjadi kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif.
- 3) Demokrasi dengan sistem referendum: dalam demokrasi ini, rakyat memiliki kontrol langsung terhadap wakil-wakilnya di dewan perwakilan rakyat. Badan perwakilan dikontrol oleh rakyat melalui referendum obligator dan fakultatif. Pada referendum obligator, kebijakan atau undang-undang yang diajukan oleh pemerintah atau dibuat dewan perwakilan rakyat baru dapat dijalankan setelah disetujui rakyat dengan suara terbanyak. Sementara dalam referendum fakultatif, undang-undang yang dibuat dewan perwakilan rakyat baru dimintakan persetujuan rakyat jika setelah undang-undang diumumkan sejumlah rakyat memintanya.

Pendidikan Demokrasi Pada Pemerintahan di Indonesia

Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya. Demokrasi juga diartikan sebagai gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara.

Sistem demokrasi yang pernah diterapkan di Indonesia adalah:

1. Demokrasi Parlementer (1950-1959)
Pada fase ini, Indonesia resmi menjadi negara yang merdeka dan menerapkan sistem demokrasi parlementer. Sistem ini berlangsung hingga tahun 1959.
2. Demokrasi Terpimpin (1959-1965)
Pada masa ini, sistem demokrasi berubah menjadi sistem demokrasi terpimpin. Sistem ini berlangsung hingga tahun 1965.
3. Demokrasi Pancasila Orde Baru (1966-1998)
Pada masa ini, sistem demokrasi berubah menjadi sistem demokrasi Pancasila. Sistem ini berlangsung hingga tahun 1998.
4. Demokrasi Pancasila Reformasi (1998-sekarang).
Setelah jatuhnya Presiden Soeharto pada Mei 1998, Indonesia mengalami proses reformasi politik yang membuka peluang bagi perkembangan demokrasi. Pada masa ini, Indonesia menerapkan sistem demokrasi yang lebih terbuka dan partisipatif.

Beberapa fungsi dan peran demokrasi di Indonesia, yaitu:

- a. Mewujudkan kedaulatan rakyat
- b. Menjamin hak asasi manusia
- c. Mendorong akuntabilitas pemerintah
- d. Melindungi keanekaragaman dan pluralisme
- e. Mendorong pembangunan ekonomi dan sosial
- f. Menjaga stabilitas politik
- g. Mendorong partisipasi masyarakat

h. Menjaga keseimbangan kekuasaan

Pendidikan demokrasi adalah proses pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan pemahaman, sikap, dan keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi secara efektif dalam kehidupan demokratis. Tujuan utama dari pendidikan demokrasi adalah untuk membentuk warga negara yang bertanggung jawab, kritis, dan aktif dalam berpartisipasi di masyarakat. Berikut beberapa aspek penting dari pendidikan demokrasi antara lain:

- 1) Pemahaman Hak dan Kewajiban: Pendidikan demokrasi mengajarkan individu tentang hak-hak dasar yang dimiliki setiap warga negara serta kewajiban-kewajiban yang harus mereka penuhi.
- 2) Keterlibatan dalam Proses Demokrasi: Mendorong partisipasi aktif dalam proses politik, seperti memberikan suara dalam pemilu, mengikuti diskusi publik, atau berpartisipasi dalam organisasi masyarakat.
- 3) Pengembangan Kemampuan Berpikir Kritis: Pendidikan demokrasi membantu individu untuk berpikir kritis dan analitis, mengajarkan mereka untuk menilai informasi secara objektif, dan membuat keputusan yang berdasarkan bukti.
- 4) Penghargaan Terhadap Perbedaan: Salah satu prinsip demokrasi adalah menghargai keragaman. Pendidikan demokrasi mengajarkan toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan pendapat, budaya, dan keyakinan.
- 5) Pemahaman tentang Pemerintahan dan Hukum: Memahami bagaimana sistem pemerintahan bekerja, peran dan fungsi lembaga-lembaga negara, serta pentingnya hukum dan peraturan dalam menjaga ketertiban dan keadilan.

Pendidikan demokrasi dapat dilakukan melalui berbagai cara, termasuk melalui kurikulum formal di sekolah, program pendidikan masyarakat, kegiatan ekstrakurikuler, dan diskusi publik. Dengan memperkuat pendidikan demokrasi, masyarakat dapat menjadi lebih inklusif, adil, dan mampu mengatasi tantangan- tantangan yang muncul dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

D. KESIMPULAN

Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan rakyat, yang berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik melalui pemilihan umum, perwakilan, dan kebebasan berekspresi. Inti dari demokrasi adalah penghormatan terhadap hak asasi manusia, kesetaraan, partisipasi warga, dan akuntabilitas pemerintah. Dengan demokrasi, diharapkan tercipta pemerintahan yang transparan, bertanggung jawab, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Keberhasilan demokrasi bergantung pada pendidikan, keterlibatan aktif warga, serta pemeliharaan institusi dan proses yang mendukung prinsip- prinsip demokratis.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Cholisilin, 2000. Materi Pokok Ilmu Kewarganegaraan- Pendidikan. Kewarganegaraan. Yogyakarta : UNY
- Maftuh, B dan Sapriya. (2005). Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan melalui Peta Konsep *jurnal civics*. 1, (5), 321

Sumario, d. (2022). Hakikat, Konsep dan Urgensi. Bandung: Widina.

Winataputra, U. S. (2014). Hakikat Belajar dan Pembelajaran. 4(1), 1-46.

Wuryan, Sri dan Syaifullah. (2009). Ilmu Kewarganegaraan (Civics). Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan